

**ADDENDUM  
NOTA KESEPAHAMAN**

Nomor : K0299/MOU/INT/JUL/2024  
Nomor : 2 TAHUN 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**LAODE M. SYARIF**  
**DIREKTUR EKSEKUTIF KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN**

dan

**IWAN HERNIWAN**  
**SEKRETARIS UTAMA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan pada Lampiran Nota Kesepahaman Nomor K1136/MOV/INT/Des/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023, sebagai berikut:

NO.	PROGRAM KERJA SAMA LKPP DAN KEMITRAAN	UNIT ORGANISASI
4	<p>c. <b>Semula:</b> Kajian Pengembangan Transformasi Digital pada Layanan Penanganan Permasalahan Hukum (Pemberian Nasihat dan Pendapat Hukum, Penyelesaian Sengketa Kontrak, Pengaduan dan Pemberian Keterangan Ahli).</p> <p><b>Menjadi:</b> Kajian Penguatan Tata Kelola Pengadaan melalui Penyusunan Survei Indeks Potensi Risiko Korupsi Pengadaan.</p>	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Demikian Addendum Nota Kesepahaman ini yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Jakarta, 1 Juli 2024

**KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA  
PEMERINTAHAN**  
DIREKTUR EKSEKUTIF,

ttd

**LAODE M. SYARIF**

Jakarta, 4 Juni 2024

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**  
SEKRETARIS UTAMA,

ttd

**IWAN HERNIWAN**